



## **EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI BARCODE PERTAMINA UNTUK BBM SUBSIDI DI KABUPATEN MERAUKE**

**Dewi Lestari<sup>1</sup>, Cindy Wulan Juni Astuti<sup>2</sup>, Ami Lintang Damayanti<sup>3</sup>,  
Ratna Wulandari<sup>4</sup>, Putri Mardini Sianturi<sup>5</sup>, Novita Pindan Madika<sup>6</sup>,  
Dimas Ardiansyah<sup>7</sup>**

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Musamus Merauke  
Email: wulancindy222@gmail.com

Received: 17-10-2025

Accepted: 15-11-2024

Published: 15-12-2025

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi barcode MyPertamina dalam distribusi BBM subsidi di Kabupaten Merauke dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan kerangka Mazmanian & Sabatier. Digitalisasi melalui QR Code diterapkan sebagai upaya menertibkan pendataan dan meningkatkan pengawasan transaksi BBM subsidi, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakteraturan administrasi kendaraan, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan akses teknologi menjadi faktor yang menghambat proses pendaftaran dan verifikasi. Selain itu, kapasitas kelembagaan daerah serta pengawasan di lapangan belum sebanding dengan kompleksitas distribusi energi di wilayah yang luas dan terpencar. Kondisi ini membuat kebijakan berjalan parsial dan belum sepenuhnya memenuhi tujuan ketepatan sasaran subsidi. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan struktural, peningkatan literasi teknologi, serta koordinasi antar lembaga agar digitalisasi BBM subsidi dapat berjalan lebih efektif dan inklusif di tingkat daerah.

**Kata kunci:** QR Code, MyPertamina, implementasi kebijakan

### **LATAR BELAKANG**

Distribusi BBM bersubsidi di Indonesia masih menyisakan banyak masalah, terutama dalam akurasi sasaran dan potensi penyalahgunaan. Regulasi subsidi yang seharusnya dapat melindungi kelompok rentan realitanya dinikmati oleh pengguna yang tidak memiliki hak, baik karena rendahnya pengawasan ataupun celah pada mekanisme penyaluran. Situasi ini membuat masyarakat yang benar-benar membutuhkan kehilangan haknya.

Distribusi BBM subsidi di Merauke bersinggungan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama nelayan, petani, dan ojek. Kelompok ini memiliki mobilitas tinggi, sehingga ketepatan sasaran BBM subsidi sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi local.

Tetapi terdapat ketidakteraturan seperti kendaraan tanpa STNK, pinjam identitas atau kendaraan operasional perusahaan yang memakai BBM bersubsidi, yang dapat menyebabkan digitalisasi belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

Respon dari masalah tersebut, di Era yang serba digital seperti sekarang ini pemerintah dan Pertamina mengeluarkan sistem pendataan digital berbasis QR Code melalui aplikasi MyPertamina untuk transaksi pembelian BBM Subsidi. Pengguna wajib melakukan pendaftaran data identitas diri dan kendaraan sebelum memperoleh QR Code yang digunakan sebagai syarat pembelian BBM Subsidi di SPBU. Sistem ini diterapkan mulai tahun 2022 hingga 2023 yang bertujuan memperketat akses konsumen dan mempermudah pelacakan transaksi.

Laporan AntaraNews (2024) mencatat bahwa regulator menyatakan digitalisasi merupakan strategi untuk menyelesaikan persoalan distribusi BBM subsidi. Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) menyebut penggunaan QR Code sebagai langkah untuk membuat distribusi subsidi lebih tepat sasaran dan terkontrol, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi tantangan di lapangan.

Penggunaan sistem digital seperti barcode atau aplikasi MyPertamina memberikan dampak positif terhadap transparansi distribusi subsidi. Suraya et al.(2025) dalam penelitiannya di Aceh menyatakan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan akurasi pencatatan dan mempermudah pengawasan SPBU terhadap transaksi BBM bersubsidi. Temuan ini serupa dengan penelitian Wijaya et al. (2025) yang menunjukkan bahwa penerapan MyPertamina di Jawa Barat memperkuat kontrol distribusi dan mengurangi potensi kecurangan, meskipun hambatan berupa akses internet dan literasi digital masih menjadi tantangan.

Keberhasilan teknologi digital bergantung pada kondisi wilayah dimana sistem tersebut diterapkan. Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten yang ada di Papua Selatan merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran dari Provinsi Papua. Kabupaten Merauke dengan wilayah yang luas namun memiliki keterbatasan infrastruktur jalan, akses internet yang belum merata, rendahnya literasi digital dan budaya sosial yang masih melekat dalam tatanan masyarakat tentunya menjadi hambatan dalam implementasi sistem tersebut.

Pada wilayah kabupaten Merauke, sistem QR code Pertamina untuk Bio-solar pendaftarannya dimulai sejak Februari 2023 dan kewajiban penggunaan QR Code diberlakukan mulai pertengahan Maret 2023. Kebijakan serupa untuk jenis Pertalite mulai diterapkan sedangkan untuk jenis Pertalite mulai diterapkan sejak September 2024. Penerapan dua tahap ini menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan distribusi BBM bersubsidi secara bertahap sesuai jenis bahan bakar dan waktu implementasinya.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem digital dapat membantu menertibkan penyaluran BBM subsidi, tetapi sebagian besar dilakukan di wilayah dengan kondisi infrastruktur yang relatif lebih siap. Situasi ini tidak sepenuhnya sebanding dengan Merauke yang

memiliki karakter wilayah luas, kondisi fisik yang beragam, dan kapasitas kelembagaan yang belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana kebijakan QR Code dijalankan dalam daerah, perubahan apa yang terjadi setelah diterapkan, dan sejauh mana kebijakan tersebut bekerja sesuai dengan tujuannya. Kajian ini berupaya mengulas hal tersebut melalui telaah literatur dan memberikan gambaran awal yang dapat membantu merumuskan langkah perbaikan kebijakan di tingkat daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah sumber-sumber ilmiah seperti jurnal, buku, laporan pemerintah, dan dokumen resmi terkait implementasi kebijakan barcode BBM subsidi. Creswell (2014) menjelaskan bahwa studi literatur merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi karya ilmiah yang relevan sehingga mampu memberikan landasan konseptual yang kuat bagi analisis penelitian.

Pada metode penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai sumber yang relevan dengan implementasi digitalisasi BBM subsidi, efektivitas kebijakan publik, serta kajian tentang penggunaan QR Code di sektor pelayanan publik. Seluruh data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menggabungkan temuan empiris dari jurnal dan berita kredibel, kemudian menempatkannya dalam kerangka teori Mazmanian & Sabatier (1983) untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di Kabupaten Merauke.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan digitalisasi BBM subsidi melalui penggunaan QR Code atau Barcode oleh Pertamina merupakan salah satu upaya memperbaiki tata kelola distribusi energi, khususnya pada daerah-daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap penyalahgunaan, kelangkaan, dan antrean kronis. Penelitian ini menggunakan kerangka Mazmanian & Sabatier (1983), keberhasilan implementasi kebijakan dapat dianalisis melalui tiga variabel besar: (1) karakteristik masalah, (2) kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, serta (3) kondisi lingkungan politik dan sosial. Ketiga variabel ini sangat relevan untuk membaca dinamika penerapan barcode BBM subsidi di Kabupaten Merauke.

Pertama, dari sisi karakter masalah, distribusi BBM subsidi di Merauke berhadapan dengan kondisi masyarakat yang memiliki praktik administrasi kendaraan yang tidak selalu tertib. Banyak kendaraan yang digunakan untuk aktivitas ekonomi tidak memiliki dokumen yang lengkap atau masih atas nama pemilik sebelumnya, sehingga proses pendaftaran QR Code menjadi terhambat. Situasi ini menunjukkan bahwa masalah kebijakan bukan sekadar soal verifikasi digital, tetapi berkaitan dengan kebiasaan administratif yang sudah terbentuk lama

dan tidak mudah diubah dalam waktu singkat. Di sisi lain, tingkat literasi digital yang tidak merata membuat sebagian warga kesulitan mengoperasikan aplikasi, mengunggah dokumen, atau mengikuti proses pendaftaran mandiri.

Kedua, dari sisi kemampuan kebijakan dalam mengatur proses implementasi, penggunaan QR Code sebenarnya membuat proses distribusi lebih rapi karena setiap kendaraan terdaftar dan pembelian bisa dipantau dengan jelas. Sistem ini juga memberi ruang bagi SPBU untuk menolak transaksi jika ditemukan pelanggaran, sehingga secara konsep terlihat tegas dan terukur. Namun ketika diterapkan ke masyarakat dengan latar belakang yang beragam, mekanisme yang serba baku ini tidak selalu berjalan mulus. Warga yang tidak memiliki kelengkapan dokumen atau kurang nyaman dengan proses digital akhirnya kesulitan mengikuti aturan, bukan karena mereka tidak berhak atas subsidi, tapi karena tuntutan administratifnya terlalu tinggi dibandingkan dengan kemampuan mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka kebijakan sudah disusun dengan rapi, belum sepenuhnya mampu menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan yang lebih cair dan tidak selalu sesuai dengan prosedur formal.

Ketiga, kondisi sosial dan kelembagaan di Merauke turut mempengaruhi jalannya kebijakan. Pemerintah daerah bersama pengelola SPBU telah melakukan sosialisasi, pengecekan, dan pendampingan bagi warga yang kesulitan mendaftar. Namun kapasitas kelembagaan untuk melakukan pengawasan belum sebanding dengan kebutuhan, mengingat wilayah Merauke luas, permukiman terpencar, dan aktivitas ekonomi sangat bergantung pada transportasi darat. Akibatnya, meskipun data penjualan tercatat secara digital, tindak lanjut terhadap temuan atau pelanggaran tidak selalu dapat dilakukan secara konsisten. Dalam kondisi seperti ini, teknologi menjadi alat bantu administratif, tetapi tidak otomatis memperkuat fungsi pengawasan di lapangan.

Dinamika yang dihadapi tersebut terlihat bahwa implementasi QR Code di Merauke memiliki manfaat untuk menertibkan data dan memberikan transparansi terhadap transaksi BBM subsidi, tetapi efektivitasnya masih terbatas. Hambatan administratif, kemampuan teknologi yang tidak merata, dan keterbatasan kapasitas lembaga membuat kebijakan berjalan tidak sepenuhnya sesuai harapan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mazmanian dan Sabatier bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kesesuaian antara karakter masalah, desain kebijakan, dan kondisi lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan. Dalam kasus Merauke, ketiga aspek ini belum saling mendukung secara optimal, sehingga hasil kebijakan cenderung parsial.

Secara menyeluruh, implementasi barcode BBM subsidi di Merauke dapat dikatakan efektif secara terbatas. Digitalisasi terbukti membantu meningkatkan akurasi pendataan, transparansi, serta pengawasan terhadap potensi penyimpangan.

Kendati demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa

kebijakan ini belum mampu mengurangi antrean kronis karena akar persoalannya terletak pada ketidakseimbangan antara pemasokan dan permintaan, penggunaan BBM oleh alat berat, dan keterbatasan kapasitas pengawasan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mazmanian & Sabatier yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kecocokan antara aspek kebijakan, karakter masalah, dan kondisi lingkungan.

## **KESIMPULAN**

Penerapan QR Code MyPertamina dalam pembelian BBM subsidi di Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa digitalisasi dapat membantu menertibkan pendataan, memperjelas profil pengguna, serta memberikan transparansi terhadap transaksi di SPBU. Sistem ini memungkinkan verifikasi yang lebih tegas dan memberikan acuan bagi pengawasan terhadap penyimpangan. Namun efektivitasnya masih terbatas karena berhadapan dengan situasi sosial dan administratif yang tidak sepenuhnya siap.

Permasalahan mendasar seperti ketidaklengkapan dokumen kendaraan, rendahnya literasi digital, serta ketergantungan pada prosedur manual membuat sebagian masyarakat kesulitan mengikuti aturan yang ditetapkan. Di sisi lain, kapasitas kelembagaan dan pengawasan di tingkat daerah masih belum sebanding dengan kompleksitas distribusi energi di wilayah yang luas dan terpencar. Dengan menggunakan kerangka Mazmanian & Sabatier, dapat dilihat bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil karena karakter masalah, desain kebijakan, dan lingkungan sosial belum saling mendukung secara optimal.

Maka, digitalisasi melalui QR Code perlu dibarengi langkah pendukung seperti peningkatan akses dan literasi teknologi, penyederhanaan prosedur administrasi, serta penguatan koordinasi antar lembaga. Integrasi antara inovasi teknologi dan penataan struktural menjadi kunci untuk mewujudkan distribusi BBM subsidi yang lebih adil dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

### **Daftar Pustaka**

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th editio).
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. A. (1989). The conditions of effective implementation: A guide to accomplishing policy objectives. In D. A. Mazmanian & P. A. Sabatier (Eds.), *Implementation and public policy* (pp. 33–60). HarperCollins.
- Suraya, S., Putri, S. Z., & Kamaly, N. (2025). *Hal*. 619. 2(3), 619–632.
- Wijaya, H., Akbar, M. N., & Irawati, F. E. (2025). *Jurnal Bakti Nusantara*. 3(1), 19–29.
- Taufikrahman, M.R, Ahmad, T, & Wibowo, D (2023). Dampak Subsidi BBM dan LPG 3kg Terhadap Kemiskinan Nelayan. Diakses dari [https://indef.or.id/publikasi/dampak-subsidi-bbm-dan-lpg-3-kg-terhadap-kemiskinan-nelayan/?utm\\_source=chatgpt.com](https://indef.or.id/publikasi/dampak-subsidi-bbm-dan-lpg-3-kg-terhadap-kemiskinan-nelayan/?utm_source=chatgpt.com)
- Tribun Papua. (2024). *Pertamina dan Polisi–Dishub Merauke jamin BBM subsidi tepat sasaran: Blokir barcode & sita tangki*. Diakses dari <https://papua.tribunnews.com/adv/121480/pertamina-dan-polisi-dishub-merauke-jamin-bbm-subsidi-tepat-sasaran-blokir-barcode-sita-tangki>
- Portal Merauke. (2025). *Pemkab Merauke bentuk satgas pengawasan BBM subsidi dalam rapat koordinasi 2025*. Diakses dari <https://portal.merauke.go.id/news/7968/pemkab-merauke-tindaklanjuti-persoalan-bbm-bersubsidi.html>